



## Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Pule

Elsa Alfionita Firdaus<sup>1</sup> Syamsul Huda<sup>2</sup> Anisa Fitria Utami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### Abstract

Received: 20 Oktober 2023  
Revised: 26 Oktober 2023  
Accepted: 01 November 2023

*Community welfare can be realized if basic needs such as clothing, food and shelter can be fulfilled. However, welfare is not only seen from the fulfillment of food needs. The need for housing is an important factor that needs attention. Limitations of the community in meeting the needs of adequate housing have resulted in many people having inadequate housing. Access to proper housing can be influenced by low economic factors in the community and high poverty. This study aims to determine the impact of the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Pule Village, Pule District, Trenggalek Regency on increasing the economic welfare of the community. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive type of research, in which data collection is carried out using in-depth interviews with beneficiaries, field observations, and data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and related agencies. The results showed that the BSPS program had a very influential impact on increasing the economic welfare of beneficiaries, builders and workers, as well as providers of building materials in Pule Village. In addition to increasing economic welfare, beneficiaries are also assisted in having proper housing in accordance with the provisions of Livable Houses (RLH). The community in Pule Village hopes that the BSPS program can be implemented again so that the community can obtain proper housing and be able to increase economic welfare.*

**Keywords:** BSPS; Well-being; Economy

(\*) Corresponding Author: [elsaalfionita17@gmail.com](mailto:elsaalfionita17@gmail.com)

**How to Cite:** Firdaus, E. A., Huda, S., & Utami, A. F. (2023). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Pule. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076503>

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan Ekonomi merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia guna mengaktualisasikan setiap individu untuk meraih tujuan hidupnya. Begitupun bagi negara, Indonesia memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea keempat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi itu sendiri terdiri dari kesejahteraan individu, masyarakat, serta negara. Dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maka ada beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan yaitu tercukupinya kebutuhan dasar yang mencakup makan, pakaian, dan tempat tinggal (Sandang, Pangan, Papan). Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, maka orang tersebut akan terjebak kedalam lingkaran kemiskinan yang nantinya tidak dapat mewujudkan kesejahteraan hidup.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai

keterjaminan dalam pendapatan, aset produktif, kebutuhan dasar yang tidak berkualitas, rendahnya kualitas tempat tinggal, Kesehatan yang buruk, serta tidak terpenuhinya dukungan guna memperoleh hak dalam mewujudkan kehidupan yang layak. Pemahaman mengenai kemiskinan juga tidak dapat dilihat hanya dari tercukupinya kebutuhan pangan. Akan tetapi, kebutuhan “papan” atau tempat tinggal yang layak juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Tempat tinggal tidak layak atau dapat disebut dengan rumah tidak layak huni terdiri dari beberapa kriteria yaitu persyaratan keselamatan bangunan yang kurang, kecukupan luas yang minim, dan akses sanitasi serta air minum yang terhalang. Aspek inilah yang membuat indikator rumah layak huni menjadi hilang sehingga membuat kebutuhan “papan” dapat dikatakan tidak terpenuhi. Ketika kebutuhan mengenai tempat tinggal tidak terpenuhi mengakibatkan rumah yang fungsinya sebagai tempat berlindung, beristirahat, dan melakukan hal produktif dan berkualitas menjadi hilang peranannya.

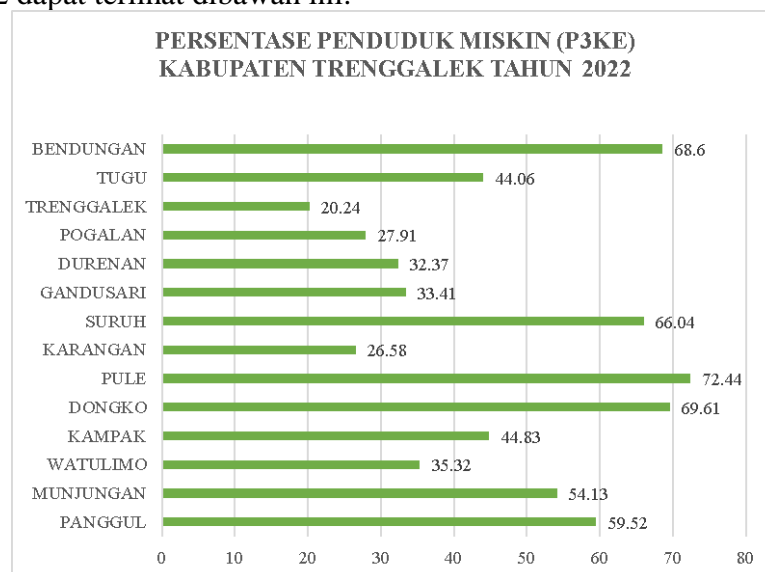
Keterbatasan untuk memperoleh hunian yang layak juga terjadi di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menggambarkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tempat tinggal atau “papan”. Perekonomian yang rendah dan kualitas hunian yang kurang membuat masyarakat Desa Pule tidak dapat mewujudkan salah satu aspek dari kesejahteraan ekonomi. Dari data dibawah ini terlihat bahwa jumlah rumah tidak layak huni yang berada di Kabupaten Trenggalek sebesar 6588 rumah. Kecamatan dengan angka jumlah RTLH tertinggi adalah di Kecamatan Bendungan yaitu sebesar 1056 rumah, lalu angka jumlah rumah tidak layak huni tertinggi kedua adalah Kecamatan Pule sebesar 1045 rumah, urutan ketiga yaitu di Kecamatan Trenggalek dengan jumlah sebesar 901 rumah.

**Tabel 1 Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Trenggalek Pada Tahun 2022**

Sumber: [satudata.trenggalekkab.go.id](http://satudata.trenggalekkab.go.id) (Data Diolah)

Kecamatan	Jumlah Rumah Layak Humi (RLH)	Jumlah Rumah Tidak Layak Humi (RTLH)
PANGGUL	20.996	387
MUNJUNGAN	14.279	107
PULE	18.829	1045
DONGKO	21.165	821
TUGU	14.063	227
KARANGAN	12.982	227
KAMPAK	11.529	310
WATULIMO	18.561	253
BENDUNGAN	7.387	1056
GANDUSARI	17.669	286
TRENGGALEK	19.459	901
POGALAN	15.035	200
DURENAN	14.663	381
SURUH	11.548	387
<b>JUMLAH</b>	<b>218.165</b>	<b>6588</b>

Kecamatan Pule merupakan kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi kedua setelah Kecamatan Bendungan. Akan tetapi, Kecamatan Pule memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dari kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 72,44%. Kecamatan Pule termasuk dalam salah satu kecamatan yang tergolong dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 42.089 orang. Data persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 dapat terlihat dibawah ini:



**Gambar 1** Persentase Penduduk Miskin (P3KE) Kabupaten Trenggalek Pada Tahun 2022

Sumber: tkpk.trenggalekkab.go.id (Data Diolah)

Terlihat dari data-data diatas, angka RTLH serta kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Pule, khususnya Desa Pule masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat berusaha untuk menurunkan angka RTLH yang berdampak juga pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS atau “Bedah Rumah” adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan (Permen PUPR No.7). Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Pule”

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman seluas mungkin tentang subyek yang dipelajari pada saat penelitian (Sjafari, 2023). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada penerima bantuan dan masyarakat sekitar, observasi lapangan, serta data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data, selanjutnya memilah informasi yang nantinya dijadikan bahan dalam penelitian. Langkah-langkah untuk menganalisis data dilakukan melalui reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menganalisis data:

### **a. Reduksi data**

Data yang dianalisis diambil dari wawancara atau pengamatan secara langsung di lapangan akan diseleksi data yang penting sehingga dapat mewakili semua data yang digunakan.

### **b. Penyampaian Data**

Data yang telah diseleksi nantinya disusun dengan sistematis. Sehingga data yang dianalisis merupakan informasi yang jelas.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Data yang telah didapat di lapangan serta telah ditampilkan maka dapat ditarik kesimpulan dari pengamatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

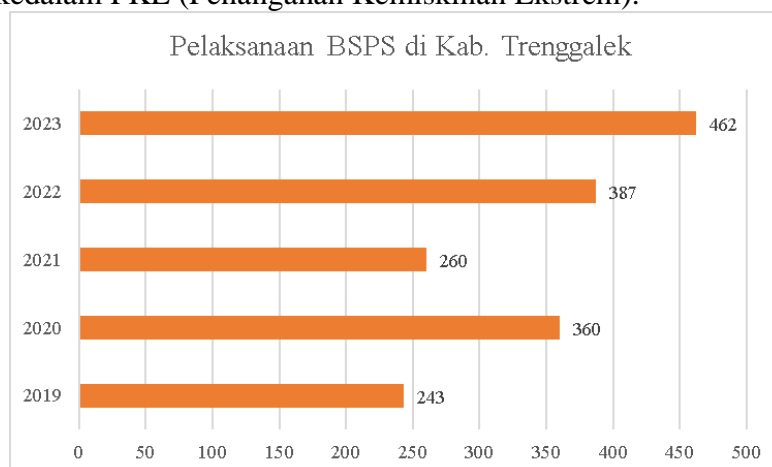
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tujuannya agar masyarakat dapat memiliki rumah layak huni. Dalam melaksanakan program BSPS perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendukung terselenggaranya program dengan berpartisipasi dalam bentuk keswadayaan dan kegotong-royongan. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, bentuk bantuan BSPS terbagi menjadi dua jenis bantuan yaitu berupa uang dan berupa barang (Sjafari, 2023). Bantuan berupa uang digunakan untuk belanja bahan bangunan dan upah pekerja, sedangkan yang dimaksud bantuan berupa barang adalah bentuk keswadayaan dari penerima

bantuan baik dari penerima bantuan itu sendiri atau masyarakat lain yang membantu proses pengerjaan rumah. Besaran dana yang diterima yaitu sebesar Rp 20.000.000 dengan pembagian Rp 17.5 Juta untuk bahan bangunan dan Rp 2.5 Juta untuk upah pekerja. Adapun kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang telah memiliki keluarga
2. Memiliki hak atas tanah yang sah atau kepemilikan sendiri dibuktikan dengan surat-surat pendukung
3. Menempati rumah dengan kriteria tidak layak huni
4. Memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)
5. Belum pernah mendapatkan bantuan program perumahan

Dana yang digunakan untuk bantuan BSPS ini berasal dari APBN yang dilaksanakan di kabupaten/kota terpilih. Dalam pelaksanaan program, kabupaten/kota harus masuk dalam kriteria yang telah ditentukan Kemenpuvr. Kriteria kabupaten/kota yang terpilih adalah sebagai berikut: termasuk kedalam salah satu daerah terbelakang, jumlah rumah tidak layak huni tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia rendah, PDRB rendah, dan beberapa kriteria pendukung lainnya. Kabupaten Trenggalek termasuk dalam kriteria tersebut, sehingga Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu kabupaten penerima bantuan BSPS.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kabupaten Trenggalek mempunyai 14 kecamatan dan 152 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan daerah pegunungan dan hanya 4 kecamatan yang terletak di dataran rendah. Desa Pule merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Desa ini terletak di ketinggian 820 MDPL, dan terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Tirisan, Krajan, Gugur, Depok, dan Bangunsari. Mayoritas warga di Desa Pule memiliki mata pencaharian di bidang pertanian khususnya komoditas padi, singkong, dan rempah-rempah. Desa Pule termasuk kedalam desa penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai pada SK DIRJEN No: 975/KPTS/Rb9.4.3/2023. Penerima Bantuan (PB) yang ada di Desa Pule sebanyak 29 Penerima Bantuan, yang kesemuanya itu termasuk kedalam PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem).





**Gambar 2 Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Trenggalek**

Sumber: [satudata.trenggalekkab.go.id](http://satudata.trenggalekkab.go.id) (Data Diolah)

### Dampak Ekonomi dari Program BSPS yang Terdapat di Desa Pule

Hunian yang dibangun sendiri disebut dengan rumah swadaya, sedangkan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan usaha masyarakat (Sjafari, 2023). Program BSPS memiliki tujuan guna menstimulan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah guna memperbaiki atau membangun rumah dengan bantuan yang dibagikan. Harapan dari program ini adalah agar masyarakat memiliki motivasi untuk mempunyai hunian yang layak dengan lingkungan rumah yang sehat. Pencapaian tujuan dari program bisa menjadi manfaat/dampak dari program BSPS. Dampak dapat dilihat dari perubahan fisik rumah penerima bantuan. Akan tetapi, dampak yang dilihat dari penelitian ini tidak hanya dilihat dari perubahan fisik rumah tetapi juga dampak ekonomi bagi penerima bantuan maupun bagi masyarakat lain.

Kondisi 0%	Kondisi 100%
	
Atap : Genteng Lantai : Tanah Dinding : Kayu	Atap : Genteng Lantai : Rabat Beton Dinding : Bata Merah Berplester

**Gambar 3** Pra dan Pasca Konstruksi Bangunan Program BSPS di salah satu PB

Sumber: data pribadi penulis

Gambar diatas merupakan dokumentasi dari pelaksanaan program BSPS di Desa Pule khususnya yang diterima salah satu penerima bantuan yaitu Bapak Achmad Arifin. Bapak Achmad Arifin yang bekerja sebagai petani memiliki seorang istri yang bekerja di toko kelontong milik pribadi. Dengan adanya program BSPS ini membantu Bapak Achmad Arifin dalam memenuhi kebutuhan dasar hunian menjadi lebih layak dan sehat. Bapak Achmad Arifin yang bekerja di bidang pertanian khususnya komoditas padi terbiasa menyimpan hasil panen yang belum terjual didalam rumah. Sebelum menerima program BSPS, rumah masih berlantaikan tanah dan berdinding kayu. Akibatnya, simpanan padi yang ingin dijual nanti ketika harga sedikit lebih mahal menjadi berkurang kualitasnya karena telah berjamur. Akan tetapi setelah menerima program BSPS dan tempat tinggal menjadi lebih baik, simpanan padi lebih baik dan tidak berjamur karena ditempatkan di gudang khusus penyimpanan yang berlantaikan rabat, dan berdinding batu merah yang tidak berjamur/lembab. Bapak Achmad Arifin juga mengungkapkan dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa *“saya sangat berterima kasih kepada program BSPS ini, karena dari program ini saya dapat memiliki rumah yang lebih baik dengan terdapat gudang untuk penyimpanan hasil panen dan juga perbaikan toko milik istri saya. Sekarang toko kecil-kecilan milik istri saya lebih tertata rapi sehingga menambah minat dari pembeli.”*

Dampak dari program BSPS ini tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan akan tetapi dirasakan juga oleh masyarakat sekitar. Dampak dari suatu program adalah perubahan yang signifikan pada tingkah laku yang dihasilkan oleh suatu program (Qomaria, 2015). Dampak ekonomi dari program BSPS yang berada di Desa Pule adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penerima Bantuan

Secara mikro, manfaat dari program BSPS bagi penerima bantuan adalah dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal atau papan dari masing-masing penerima bantuan. Kebutuhan papan yang tercukupi akan membuat keluarga tersebut memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lainnya (sandang dan pangan). Selain itu, ketika penerima bantuan memiliki toko/warung/gudang penyimpanan hasil pertanian maka BSPS akan ikut andil dalam memberikan perubahan akses perdagangannya walaupun impact dari hal tersebut tidak terlalu mencolok. Secara makro, program BSPS berpengaruh pada terwujudnya ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penerima bantuan. Ketika kebutuhan akan rumah dapat terwujud maka berdampak pula pada terpenuhinya kebutuhan dasar hidup lainnya seperti sandang, pangan, lapangan kerja, peningkatan kualitas kesehatan, turunnya angka kemiskinan, perbaikan taraf hidup, meningkatkan rasa percaya diri masyarakat, serta memberikan rasa aman nyaman bagi penghuninya. Semua aspek tersebut merupakan aspek yang harus ada dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Bagi Tukang

Program BSPS dapat meningkatkan pendapatan bagi tukang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, tentang alokasi anggaran untuk upah pekerja menyebabkan pekerjaan yang semula gotong royong menjadi menggunakan tenaga kerja. Adanya anggaran upah tenaga kerja menyediakan lapangan kerja dan tambahan pendapatan bagi para pekerja konstruksi. Secara mikro, tambahan pendapatan akan mensejahterakan ekonomi individu dari tiap tukang dan pekerja. Akan tetapi, secara makro dapat mensejahterakan perekonomian nasional karena dari sektor konstruksi akan meningkat dan membuat PDB meningkat.

#### 3. Bagi Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Program BSPS dapat meningkatkan pendapatan bagi toko bangunan/penyedia bahan bangunan karena toko bangunan menyediakan bahan bangunan bagi penerima bantuan selama proses pembangunan berlangsung. Dengan pendapatan yang bersumber dari BSPS maka pemilik toko dapat memutar kembali modal sehingga mendapatkan laba yang lebih banyak. Laba yang tinggi dapat membuat bisnis berkembang lebih pesat.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas dapat dikatakan bahwa program BSPS merupakan sebuah program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Pule. Pengukuran ini dapat terlihat dari manfaat atau dampak positif yang diterima oleh penerima bantuan, tukang, penyedia bahan bangunan, maupun masyarakat disekitarnya. Dengan perekonomian yang meningkat maka dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.

## **Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Dampak dari Program BSPS di Desa Pule**

Menurut Van Meter dan Van Horn (Dalam Qomaria, 2015) untuk melihat kesuksesan program dalam mencapai tujuan dan sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sasaran program dan tujuan dari program, karakteristik dan sikap dari pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial dari tempat dilaksanakannya program. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak dari pelaksanaan program BSPS di Desa Pule adalah sebagai berikut:

### a) Sasaran program

Sasaran dari suatu program harus terstruktur dan jelas. Hal ini agar program yang akan dilaksanakan tepat sasaran. Sasaran dan tujuan dari program BSPS sudah jelas dan dilindungi oleh Peraturan Menteri PUPR No. 7/2022. Tujuan dari adanya program BSPS adalah gunamendukung masyarakat yang memiliki penghasilan rendah guna mendirikan rumah layak huni dengan dana bantuan yang diberikan serta keswadayaan dari penerima bantuan. Sedangkan sasaran dari program ini adalah untuk MBR yang memiliki hunian tidak layak huni.

### b) Karakteristik dan sikap pelaksana program

Pelaksana program diwajibkan dapat membantu program yang telah diputuskan dengan koordinasi yang baik. Pada pelaksanaan program BSPS di Desa Pule memerlukan peran dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, dan Perangkat Desa agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, sikap pelaksana program BSPS di Desa Pule juga sudah cukup baik. Terdapat pengarahan mengenai program kepada masyarakat sehingga implementasi program BSPS di Desa Pule cukup baik dan pelaksana program bertanggungjawab atas tugasnya.

### c) Sumber daya

Pelaksanaan program BSPS di desa Pule memiliki dua sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya berupa materi. Sumber daya manusia yaitu pelaksana program diantaranya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, Perangkat desa, Tenaga Fasilitator Lapangan, dan masyarakat. Sedangkan sumber daya berupa materi adalah dana yang diberikan oleh BSPS yang berasal dari APBN.

### d) Komunikasi

Komunikasi yang baik akan membuat suatu program dapat berjalan sesuai aturannya. Komunikasi yang dibangun oleh Dinas, Perangkat desa, TFL, serta penerima bantuan sudah cukup baik. kejelasan dalam komunikasi membuat penyampaian alur serta prosedur program tidak terhambat oleh miskomunikasi. Komunikasi baik akan membuat pelaksanaan suatu program menjadi baik pula.

### e) Lingkungan sosial

Ketika suatu program dilaksanakan ingin menghasilkan hasil yang baik maka lingkungan sosial juga harus mendukung hal tersebut. Lingkungan sosial yang berada di Desa Pule mendukung adanya program BSPS ini. Hal tersebut dibuktikan pada pelaksanaan proses pembangunan tak sedikit warga yang turut serta bergotong royong membantu penerima bantuan yang lain.

Dalam pelaksanaan suatu program pasti akan menemui beberapa hambatan yang dapat membuat suatu program menjadi kurang maksimal sehingga kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan program BSPS di Desa Pule juga memiliki hambatan yaitu kondisi topografi Desa Pule yang merupakan daerah pegunungan maka infrastruktur jalan masih banyak yang rusak ditambah lagi kondisi cuaca yang tidak menentu membuat proses pembangunan menjadi terhambat. Penyedia bahan bangunan juga kesulitan untuk dropping material. Hal ini membuat bahan bangunan menjadi terlambat terdistribusikan ke Penerima Bantuan dan membuat proses pembangunan terhenti. Selain itu, terdapat hambatan lain yakni keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program. Program BSPS dilaksanakan dalam 5 bulan mulai dari tahap verifikasi calon penerima bantuan hingga penyusunan laporan. Waktu tersebut dirasa kurang dalam melaksanakan program baik pekerjaan di lapangan maupun pekerjaan administrasinya.

Akan tetapi, hambatan yang muncul di Desa Pule ini dapat diatasi dengan beberapa upaya atau solusi diantaranya yaitu dari desa supaya mengusahakan untuk meningkatkan infrastruktur jalan agar jalan dapat digunakan serta dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya bagi program BSPS tapi juga program-program yang lain. Selain itu, dari penyedia bahan bangunan juga dapat menambah armada sehingga dapat mendistribusikan bahan bangunan dengan lebih maksimal kembali. Untuk hambatan keterbatasan waktu pelaksanaan program BSPS, pemerintah pusat khususnya DPR Komisi V dan Kementerian PUPR harus berkolaborasi untuk membuat kebijakan dan peraturan dengan lebih memperhatikan kondisi lapangan. Pemerintah pusat tersebut dapat menambah waktu dalam pelaksanaan BSPS agar hasil yang dihasilkan dapat maksimal dan menghindari kesalahan dalam pengerjaan baik lapangan atau berkas administrasinya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang dapat mendorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membangun rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni melalui dana bantuan yang diberikan dan bentuk keswadayaan lain dari penerima bantuan. Tujuan dari diadakannya program ini agar masyarakat yang tidak mampu dapat menghuni rumah yang layak sebagai pemenuhan kebutuhan pokok hidup yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan. Dampak dari adanya program BSPS ini yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat baik bagi penerima bantuan, tukang atau pekerja, dan penyedia bahan bangunan. Bagi penerima bantuan dapat dibantu akses gudang atau toko sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Bagi tukang dan pekerja, dengan adanya program BSPS ini dapat meningkatkan pendapatannya. Dan bagi penyedia bahan bangunan, dengan adanya program ini dapat meningkatkan laba penjualannya. Program BSPS secara tidak langsung bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam mewujudkan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Pule dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sasaran dan tujuan program, karakteristik dan sikap dari pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial. Dan dalam mewujudkan manfaat bagi masyarakat tersebut pasti akan menemui hambatan. Di desa Pule hambatan yang terjadi yaitu mengenai

waktu pelaksanaan program dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Akan tetapi, hambatan tersebut tidak membuat pelaksanaan program BSPS menjadi kurang baik dan tidak menciptakan manfaat/dampak positif bagi masyarakat. Program BSPS di Desa Pule dinilai cukup baik dalam memberikan perubahan dan dampak kepada masyarakat baik penerima bantuan maupun masyarakat sekitar dalam meningkatkan kualitas hunian menjadi lebih layak dan juga mengurangi kemiskinan. Kemiskinan yang menurun menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat.

Setiap program yang dicetuskan oleh pemerintah mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan saran untuk memperbaiki program tersebut agar dimasa mendatang program dapat dijalankan lebih maksimal. Saran dari penulis adalah mengenai perpanjangan waktu untuk pelaksanaan program agar program yang dilaksanakan dapat maksimal sehingga mampu memberikan manfaat atau dampak positif yang lebih besar. pemerintah pusat khususnya DPR Komisi V dan Kementerian PUPR harus berkolaborasi untuk membuat kebijakan dan peraturan dengan lebih memperhatikan kondisi lapangan khususnya pada waktu pelaksanaan program.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020. *Jakarta*, 4102004.64, 37–39.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Kabupaten Trenggalek dalam angka 2023. *Kabupaten Trenggalek*, 1–11.
- Fajar, A. M., Seran, G. G., & Purnamasari, I. (2021). Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Governansi*, 7(1), 19–28. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3038>
- Hara, K. M. (2020). Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Masyarakat di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 5(2), 73–81. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v5i2.541>
- Indayani, & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Khairunnisa. (2016). *Peranan BSPS Terhadap Ekonomi dan Sosial Penerima Bantuan di Kecamatan Simpang Empat*. 2(3), 1–23.
- Meilia, A., Safitri, D., Sutiyoso, B. U., & Si, M. (2019). *Dampak Ekonomi Dan Sosial Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu*.
- Permen PUPR No., 7/2022). (n.d.). *tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya*.

- Prasetyaningtyas, P. (2014). Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan di Kecamatan Pacitan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1), 1–9.
- Qomaria, A. (2015). Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–7.
- Robiansyah, I., Suryapermana, N., & Sudrajat, B. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang). *Tsarwah*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v7i1.6567>
- Siti Rofiqoh, A. (2021). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017. *Cahaya Ilmu*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Sjafari, A. (2023). *Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Di Kabupaten Pandeglang*. 16(1), 1–13.